



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TONNY NAINGGOLAN**
2. Jabatan : **KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**
3. NHK : **150096**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.587.640.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/80 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 295.972.000
2. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 207.850.000
3. Tanah Seluas 293 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 116.442.000
4. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.020.000
5. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 186.656.000
6. Tanah Seluas 29.315 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 995.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 375.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET TROOPER/JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA HR V RU5 1.8 RS CVT CKD / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.752.285
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.027.392.285
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.027.392.285

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.